



LAPORAN E-LHKPN PEJABAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

PEMERINTAH KOTA SABANG



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 410771

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	485.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000		
2. Tanah Seluas 571 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 230.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT NC11B1C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, HONDA X1H02N3M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.846.267
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	520.346.267
III. HUTANG	Rp.	160.328.348
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	360.017.919

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD AZNI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **902914**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.147.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 458 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 741 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 222.300.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **102.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S/MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA DIBOZN13L2.A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N36M1. A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **42.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.069.667
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.299.369.667
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.299.369.667

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.